

SIDAK OMBUDSMAN SULSEL : KOORDINASI DAN KOMITMEN UNTUK TERWUJUDNYA SINERGITAS PELAYANAN PUBLIK

Senin, 10 Juni 2019 - Andi Anas Chaerul M

Makassar - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Subhan bersama jajaran Ombudsman melakukan sidak layanan publik pada tiga instansi penyelenggara layanan publik pada hari Minggu (9/6). Sidak dilakukan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel , Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar. Tujuan dari sidak tersebut untuk memastikan penyelenggaraan layanan publik berjalan selama libur lebaran.

"Selama libur lebaran SPKT tetap memberikan layanan, dan ada satu laporan yang masuk, yang diterima pada tanggal 5 Juni 2019," ungkap salah seorang staf SPKT.

Subhan menyampaikan bahwa informasi persyaratan layanan pada SPKT Polda Sulsel cukup transparan di mana informasi tersebut yang menjadi hak masyarakat telah dipajang, termasuk biaya / tarif gratis. Selanjutnya jika terdapat sarana yg kurang agar secepatnya dilengkapi guna kelancaran dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, Ombudsman melanjutkan sidak di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dengan melakukan pengecekan pada Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Angkasa Pura. Diterima oleh sdr. Nurani, selaku Airport Security Screening Manager.

" Untuk fasilitas check in, ada tambahan sarana self check - in sebanyak 12 (dua belas) unit, yang memiliki sistem user - friendly, agar mudah untuk digunakan" ujar Dian selaku Airport Operation Landside and Terminal Manager.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dian menambahkan bahwa pada H-7 sampai dengan H +2, terdapat penurunan jumlah penumpang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun menurut Subhan meskipun faktor yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang tersebut tidak diketahui pasti, pelayanan terhadap pengguna layanan di Bandara harus tetap maksimal. Pada kesempatan itu, Nurani sebagai Airport Security Screening Manager juga memperlihatkan papan informasi yang memuat informasi tarif batas atas dan batas bawah setiap airlines. "Hal ini disampaikan kepada publik agar menjadi kontrol, dimana setiap airlines tidak boleh melebihi batas tarif tertinggi," tegas Nurani.

Sidak Ombudsman berakhir di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)Wahidin Sudirohusodo Makassar. Tim Ombudsman langsung mengecek pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Suriati, salah seorang Duty Manager RSWS menyatakan bahwa sebagaimana koordinasi dengan direksi, maka selama libur lebaran 2019 bagian Poli tetap dibuka pada tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019. "Terdapat sebanyak kurang lebih 200 pasien yang datang berobat," terangnya.

Suriati menambahkan bahwa Layanan Sistrute (Sistem Rujukan Terpadu) IGD tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. "Pada tanggal 3 - 7 Juni, terdapat jumlah pasien non bedah sebanyak 146 , lalu pasien bedah sebanyak 123, anak sebanyak 39 pasien dan obgyn sebanyak 35 pasien," jelas Suriati.

Dirut RSWS , Dr. Khalid yang juga sedang mengontrol ruang IGD menyampaikan bahwa layanan poli selama libur lebaran disatukan di Poli Reguler. Di samping itu RSWS menerima banyak pasien rujukan dari kabupaten /kota. Meskipun menerima banyak pasien rujukan, pelayanan tetap dimaksimalkan, termasuk jika terdapat pasien gawat darurat, langkah pertama adalah menyelesaikan kondisi gawat darurat pada pasien, meskipun pasien tersebut tidak memiliki jaminan BPJS.

"Perhatian pemerintah daerah sangat dibutuhkan bagi pasien - pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS)," harap Dr. Khalid.

Menyikapi harapan tersebut, Subhan akan senantiasa mendukung upaya upaya Dirut dan jajaran RSUP Wahidin Sudirohusodo dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. "Butuh koordinasi dan komitmen para stakeholder, agar sinergitas pelayanan publik terwujud," kata Subhan.